

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA KINERJA KEUANGAN SANGGAR BIMBINGAN ‘AISYIYAH KAMPUNG PANDAN MALAYSIA

PENULIS

¹Dewi Fatimah Triwahyuningsih, ²Evi Dwi Kartikasari

ABSTRAK

Fenomena yang muncul dalam pengelolaan SBA Kampung Pandan Malaysia yaitu pencatatan keuangan yang masih sederhana, keterbatasan akses informasi bagi pemangku kepentingan, pembagian tugas keuangan yang belum terstruktur, serta belum adanya SOP baku terkait pelaporan dan pengawasan keuangan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kinerja keuangan sanggar, baik dari aspek efektivitas penggunaan dana, keakuratan laporan, maupun kemampuan organisasi mempertanggungjawabkan setiap transaksi kepada pihak internal maupun eksternal. Dalam konteks lembaga pendidikan komunitas yang bersifat nirlaba, penerapan *good governance* merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga kepercayaan donatur, orang tua siswa, organisasi induk ‘Aisyiyah, serta masyarakat luas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana prinsip *good governance* telah diterapkan dan sejauh mana penerapan tersebut memengaruhi kinerja keuangan sanggar. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, serta telaah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan dan keuangan SBA Kampung Pandan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa SBA Kampung Pandan telah berupaya mengimplementasikan prinsip *good governance* pada sisi tata kelola organisasi. Meskipun demikian, dalam praktik keuangan masih ditemukan beberapa kelemahan, seperti: (1) Akuntabilitas yang belum optimal karena pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual tanpa standar akuntansi yang jelas; (2) Transparansi yang rendah akibat tidak adanya sistem dokumentasi yang memadai serta ketiadaan audit internal maupun eksternal; dan (3) Aspek supremasi hukum belum terpenuhi karena laporan keuangan belum mengikuti ketentuan PSAK 45/ISAK 35.

Kata Kunci

Prinsip *Good Governance*, Kinerja Keuangan, Pembayaran

AFILIASI

Program Studi
Nama Institusi
Alamat Institusi

^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
^{1,2}Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan
^{1,2}Jl. K.H. Ahmad Dahlan 40, Lamongan

KORESPONDENSI

Penulis
Email

Evi Dwi Kartikasari
evican91@gmail.com

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba yang berfokus pada bidang pendidikan, seperti Sanggar Bimbingan (SB), memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan lembaga seperti ini sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan integritas pengelolaannya. Pada praktiknya, Sanggar Bimbingan 'Aisyiyah (SBA) Kampung Pandan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena operasional lembaga sebagian besar bergantung pada iuran SPP yang dibayarkan oleh orang tua peserta didik. Ketidakstabilan pembayaran serta munculnya tunggakan menjadi masalah yang memengaruhi keberlangsungan kegiatan dan pembayaran honor tenaga pendidik. Selain itu, pencatatan keuangan di SBA Kampung Pandan masih dilakukan secara manual melalui pembukuan sederhana yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam aspek akuntabilitas. Ramadhan (2020) menegaskan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam organisasi nirlaba sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas lembaga dalam mencapai tujuannya.

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pembangunan yang memiliki tanggung jawab, berlandaskan demokrasi, efisiensi pasar, serta mampu mencegah penyimpangan baik secara administratif maupun politik. Tata kelola yang baik mendorong terwujudnya manajemen keuangan yang transparan, akuntabel, serta mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Purba et al., 2024). Prinsip ini tidak hanya penting bagi sektor pemerintahan atau perusahaan, tetapi juga dibutuhkan oleh organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk Sanggar Bimbingan. Organisasi publik dan nirlaba yang menerapkan *good governance* akan memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan lembaga (Edowati et al., 2021). UNDP (LAN & BPKP, 2000) menyebutkan bahwa prinsip tata kelola yang baik mencakup partisipasi, kepastian hukum, transparansi, responsivitas, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat memperkuat proses pengambilan keputusan, mengurangi potensi penyimpangan, serta meningkatkan kinerja organisasi.

Kegagalan menerapkan praktik tata kelola yang baik dapat menurunkan tingkat kepercayaan donatur, memicu inefisiensi, hingga menyebabkan penyalahgunaan dana. Dalam konteks organisasi nirlaba, kondisi lingkungan yang dinamis menuntut adanya perencanaan yang lebih matang dan sistematis (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, implementasi *good governance* pada lembaga seperti Sanggar Bimbingan merupakan kebutuhan yang mendesak. Secara regulatif, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 mengharuskan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bertransformasi menjadi satuan pendidikan nonformal. Sanggar Bimbingan sendiri didirikan sebagai bentuk kepedulian KBRI Kuala Lumpur melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan layanan pendidikan dasar bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak memiliki akses pendidikan resmi. Saat ini terdapat sekitar 55 sanggar bimbingan yang tersebar di berbagai wilayah Malaysia (Nurrahman & Triwahyuni, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, Sanggar Bimbingan 'Aisyiyah Kampung Pandan Malaysia yang berlokasi di Sekretariat Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah/'Aisyiyah Kampung Pandan, Kuala Lumpur terus berkembang sebagai lembaga pendidikan komunitas yang menyediakan layanan pembelajaran bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. Pertumbuhan jumlah peserta, aktivitas pembelajaran, serta keterlibatan donatur dan organisasi pendukung membuat kebutuhan akan pengelolaan keuangan yang profesional semakin meningkat. Namun, peningkatan aktivitas tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) secara optimal.

Fenomena yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan keuangan masih dilakukan secara sederhana, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan informasi dan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan. Di sisi lain, transparansi kepada orang tua, donatur, dan pengurus belum terstandarisasi, sehingga tidak semua pihak memperoleh

akses yang sama terhadap informasi terkait penggunaan dana operasional sanggar. Aspek akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawaban juga menghadapi tantangan, terutama terkait pembagian tugas keuangan yang belum terdokumentasi dengan jelas. Struktur organisasi yang bersifat social kemasyarakatan membuat proses pengambilan keputusan keuangan sering bercampur antara pertimbangan sosial dan non teknis, sehingga independensi dalam pengelolaan keuangan tidak selalu terjaga. Selain itu, seiring bertambahnya jumlah program dan bantuan, diperlukan adanya sistem pengawasan internal yang lebih kuat. Kurangnya standar operasional prosedur (SOP) keuangan membuat implementasi prinsip responsibilitas dan *fairness* belum terukur secara konsisten, terutama dalam distribusi sumber daya dan pengelolaan dana yang berasal dari berbagai pihak. Fenomena-fenomena tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menilai sejauh mana prinsip *good governance* telah diterapkan dan bagaimana implementasinya mempengaruhi kinerja keuangan sanggar, baik dari aspek efisiensi, efektivitas, maupun keandalan laporan keuangan. Analisis ini penting tidak hanya untuk meningkatkan kualitas tata kelola, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan program pendidikan bagi komunitas migran Indonesia di Malaysia.

Qomariyah & Sulistyowati (2022) membedakan organisasi menjadi dua jenis tujuan, yaitu yang berorientasi laba dan nirlaba. Lembaga pendidikan, baik swasta maupun pemerintah, termasuk dalam kategori entitas nirlaba yang harus mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan lembaga. Meinarti et al. (2024) menegaskan bahwa organisasi nirlaba harus memastikan pengelolaan sumber daya dilakukan secara bertanggung jawab sesuai prinsip tata kelola. Namun, SBA Kampung Pandan hingga kini masih mengandalkan pencatatan kas sederhana berupa daftar pemasukan dan pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntabilitas yang seharusnya diterapkan—seperti ketentuan PSAK 45 untuk entitas nirlaba—belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dan bagaimana penerapannya memengaruhi kinerja keuangan Sanggar Bimbingan 'Aisyiyah Kampung Pandan Malaysia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Konsep *good governance* merupakan kerangka yang digunakan untuk memastikan suatu organisasi mampu dikelola secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. UNDP (LAN dan BPKP, 2000) menjelaskan bahwa *good governance* mencakup seperangkat prinsip yang bertujuan menciptakan tata kelola yang efektif dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi, kepatuhan terhadap hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Keseluruhan prinsip ini menjadi pedoman dasar dalam meminimalkan penyimpangan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada organisasi publik maupun nirlaba.

- 1) Prinsip Transparansi. Transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Organisasi wajib menyediakan akses informasi yang memadai mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan aktivitasnya. Ketersediaan data yang mudah diakses memungkinkan publik menilai kinerja dan integritas suatu lembaga, termasuk dalam proses pengelolaan keuangan, penyusunan kebijakan, dan capaian program. Transparansi yang kuat menjadi fondasi bagi terciptanya kepercayaan publik.
- 2) Prinsip Akuntabilitas. Akuntabilitas menggambarkan sejauh mana suatu organisasi mempertanggungjawabkan setiap tindakan, penggunaan sumber daya, dan hasil yang dicapai. Menurut Krina (2003), akuntabilitas publik menilai kesesuaian penyelenggaraan layanan dengan nilai, standar, dan ekspektasi para pihak yang berkepentingan. Dalam konteks organisasi nirlaba, akuntabilitas tidak terbatas pada pelaporan keuangan, tetapi juga meliputi proses pertanggungjawaban program, evaluasi hasil, dan kesesuaian dengan tujuan organisasi.
- 3) Prinsip Supremasi Hukum. Supremasi hukum memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi dijalankan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Konsep ini mencakup tiga unsur utama:

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penerapan hukum yang konsisten memberikan kepastian prosedur, melindungi organisasi dari penyimpangan, serta mengurangi risiko keputusan yang tidak sesuai aturan. Bagi organisasi nirlaba, kepatuhan pada standar akuntansi dan regulasi operasional merupakan bagian dari penerapan prinsip ini.

- 4) Prinsip Visi Strategis. Visi strategis menunjukkan arah jangka panjang organisasi dalam mencapai tujuan mulia yang telah ditetapkan. Organisasi yang mengimplementasikan *good governance* harus memiliki pemimpin yang mampu merumuskan visi ke depan serta mendorong seluruh elemen organisasi untuk bergerak ke arah tersebut. Visi tidak hanya menggambarkan cita-cita, tetapi juga menjadi dasar dalam merancang program, menyusun strategi, dan mengembangkan inovasi organisasi.
- 5) Prinsip *Profesionalisme*. *Profesionalisme* berkaitan dengan kemampuan organisasi menjalankan fungsi dan tugas secara kompeten, sesuai standar, serta didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis yang memadai. Pelaksanaan program harus mengacu pada prosedur yang jelas, dilengkapi dengan mekanisme evaluasi dan peningkatan kapasitas. *Profesionalisme* juga menuntut integritas serta komitmen terhadap visi dan misi organisasi.
- 6) Prinsip *Responsiveness*. *Responsiveness* mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi serta menanggapi kebutuhan para pemangku kepentingan. Organisasi yang responsif bersifat adaptif terhadap dinamika lingkungan, cepat mengambil keputusan, dan berupaya konsisten menyediakan layanan yang relevan. Dalam konteks lembaga pendidikan, responsivitas dapat terlihat melalui penyesuaian layanan, penyediaan fasilitas, dan keterlibatan aktif dalam menyelesaikan permasalahan.
- 7) Prinsip Efisiensi dan Efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan keberhasilan organisasi mencapai tujuan, sementara efisiensi berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya. Organisasi yang menerapkan *good governance* selalu merencanakan kegiatannya secara matang, melakukan perhitungan kebutuhan secara detail, serta memastikan bahwa setiap anggaran digunakan secara tepat sasaran. Santosa (2008) menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi dapat tercapai jika terdapat struktur kerja yang baik, kemitraan antarpihak, sistem imbalan yang memadai, serta pelayanan publik yang berorientasi pada keadilan dan kepentingan masyarakat.

Menurut *Institute on Governance* 1996 (Santosa, 2008) untuk *menciptakan good governance* perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kerangka kerja tim antar organisasi, departemen dan wilayah.
- 2) Hubungan kemitraan antara pemerintah dan setiap bagian dari masyarakat negara yang bersangkutan.
- 3) Pemahaman dan komitmen terhadap keuntungan dan pentingnya kerjasama dan tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan.
- 4) Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong kemampuan dan keberanian untuk menanggung resiko (*risk taking*) dan berinisiatif, sepanjang ini dapat dikembangkan secara realistis.
- 5) Pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau, dan bersahabat didasarkan pada asas keadilan dan pemerataan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan ini berfokus pada kepentingan masyarakat, profesional, dan tidak berpihak.

2.2 Kinerja keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya ekonomi secara optimal selama periode tertentu. Rudianto (2013) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai hasil yang diperoleh manajemen dalam mengelola aset dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas. Bagi organisasi nirlaba, informasi kinerja

keuangan diperlukan untuk menilai keberhasilan pengelolaan dana, tingkat akuntabilitas, serta kapasitas organisasi dalam mempertahankan keberlanjutan layanan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2011) menetapkan bahwa entitas nirlaba wajib menyajikan laporan keuangan yang mampu menggambarkan posisi keuangan, perubahan aset bersih, arus kas, serta informasi tambahan yang diperlukan. Empat komponen utama laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 meliputi:

- 1) **Laporan Posisi Keuangan**
Dokumen ini menampilkan informasi terkait aset, liabilitas, dan ekuitas bersih organisasi pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang kondisi sumber daya yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi.
- 2) **Laporan Aktivitas**
Laporan aktivitas menunjukkan perubahan aset bersih selama satu periode, termasuk penerimaan dan penggunaan dana. Laporan ini menggambarkan bagaimana sumber daya digunakan untuk mendukung misi organisasi dan perubahan ekuitas yang terjadi.
- 3) **Laporan Arus Kas**
Laporan ini menyajikan arus masuk dan keluar kas dalam suatu periode, sehingga memungkinkan penilaian terhadap kemampuan organisasi menjaga likuiditas dan mendukung keberlanjutan operasional.
- 4) **Catatan atas Laporan Keuangan**
Bagian ini memberikan penjelasan tambahan terkait kebijakan akuntansi, rincian informasi penting, serta pengungkapan lain yang tidak tercantum dalam laporan utama. Catatan ini membantu pengguna laporan memahami konteks dan interpretasi angka-angka keuangan secara lebih komprehensif.

Pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 45 bertujuan memperkuat akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya secara bertanggung jawab.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Merujuk pada pendapat Moleong (2010), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek secara mendalam meliputi perilaku, persepsi, motivasi, maupun Tindakan melalui pemahaman holistik dan dilakukan dalam situasi alamiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan tanpa manipulasi variabel.

Objek penelitian ini adalah Sanggar Bimbingan 'Aisyiyah Kampung Pandan yang berlokasi di Sekretariat Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah/ 'Aisyiyah (PRIM/A) Kampung Pandan, Lot 83, Jalan Belangkas, Kampung Pandan, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia. Proses penelitian dilaksanakan pada periode Januari hingga Februari 2025.

Informan penelitian terdiri dari dua pengelola utama Sanggar Bimbingan yang memiliki peran strategis dalam aktivitas operasional serta pengelolaan keuangan. Kedua informan tersebut menjadi sumber utama penggalan data karena mengetahui secara langsung proses penyelenggaraan kegiatan di SBA Kampung Pandan.

Data diperoleh melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap aktivitas sanggar, wawancara mendalam dengan pengelola, serta pengamatan atas proses administrasi dan pengelolaan keuangan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman faktual dan detail mengenai praktik tata kelola yang diterapkan. Data sekunder berasal dari dokumen dan arsip sanggar, seperti catatan keuangan, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan operasional SBA Kampung Pandan. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi melengkapi informasi hasil observasi dan wawancara.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setiap informasi yang diperoleh dikategorikan sesuai tema penelitian untuk kemudian dianalisis guna menggambarkan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan di SBA Kampung Pandan. Tahapan-tahapan ini memastikan interpretasi yang dihasilkan tetap objektif dan sesuai dengan konteks penelitian kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan yang merupakan Pengelola sekaligus guru di Sanggar Bimbingan ‘Aisyiyah Kampung Pandan menyatakan bahwa pendanaan yang diterima hanya berasal dari iuran SPP para siswa-siswinya dan mengandalkan kepercayaan terhadap pemegang keuangan. Dukungan yang didapat dari KBRI melalui Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) berupa pelatihan untuk guru dan penyediaan fasilitas belajar seperti papan tulis, penghapus, spidol, dan lainnya. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dalam tata kelola Sanggar Bimbingan ‘Aisyiyah Kampung Pandan Malaysia sudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Namun, Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 belum diterapkan dalam penyajian laporan keuangannya. SBA Kampung Pandan dalam pelaporannya membuat laporan keuangan bulanan serta laporan tahunan sederhana yakni dengan kolom pemasukan, pengeluaran dan saldo akhir. Secara umum, tujuan laporan sanggar bimbingan telah dicapai. Namun, hal ini tidak memenuhi standar pelaporan entitas nirlaba. Sesuai dengan PSAK 45 IAI (2011), organisasi nirlaba harus menyajikan empat jenis laporan keuangan untuk memastikan akuntabilitas: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Sanggar Bimbingan ‘Aisyiyah Kampung Pandan (SBA) menerapkan prinsip-prinsip Good Governance untuk memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efektif. Prinsip-prinsip ini mendukung pengelolaan yang lebih baik dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikan hingga keuangan, demi kemajuan dan keberlanjutan program SBA. Selanjutnya, berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai prinsip-prinsip tersebut.

4.1 Prinsip Transparansi

Prinsip Transparansi pada Sanggar Bimbingan ini dilihat dari penyampaian sejarah atau profil, visi, misi dan struktur organisasi yang dibuat secara tertulis dan sudah diketahui oleh seluruh elemen Sanggar Bimbingan. Terdapat juga media sosial seperti Web dan Instagram untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan, video profil Sanggar Bimbingan, informasi akademik, maupun prestasi dari para siswa-siswinya. Dalam transparansi penyampaian laporan keuangan Sanggar Bimbingan disampaikan dalam rapat dengan internal organisasi yaitu pengelola dan wali murid dalam bentuk laporan keuangan sederhana. Akan tetapi, keterbukaan data keuangan belum disertai dengan sistem dokumentasi yang baik dan tidak ada mekanisme audit internal/eksternal. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat transparansi masih rendah dan diperlukan adanya pelaporan yang lebih rinci dan mudah diakses. Informasi ini diperoleh langsung dari informan yang mengatakan bahwa:

“penerapan transparansi dilakukan dengan mempublikasi kegiatan maupun tata kelolanya dalam web ataupun social media. Kami mengunggah laporan prestasi siswa dan keuangan agar wali murid juga dapat melihat atau ngecek langsung disana”

4.2 Prinsip Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas keuangan bergantung pada kepercayaan terhadap pemegang kas serta iuran SPP dicatat manual pada buku yang terdiri dari kolom pemasukan, pengeluaran dan saldo. Ketiadaan standar akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan SBA menyebabkan risiko pengelolaan yang tidak akuntabel, meskipun tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan dana. Penetapan biaya terkait pendaftaran, iuran SPP dan publikasi laporan keuangan tahunan mereka mengambil keputusan dari hasil rapat wali murid, pengelola dan PCIA. Informasi yang disampaikan oleh informan Adalah sebagai berikut:

“kalau keuangannya ya kita catat secara manual pemasukan dan pengeluaran secara contikue setiap hari. Jadi setiap hari juga bisa dilihat sisa saldo kita masih berapa. Keterbatasan pengetahuan kami tentang pencatatan yang seharusnya itu seperti apa sehingga kami menyederhanakan begitu saja. Asal bisa dibaca jelas dan dipertanggungjawabkan saja. Hasil laporan juga dipublikasi di web kok”

4.3 Prinsip Supremasi Hukum

Program Sanggar Bimbingan (SB) dibentuk oleh KBRI Kuala Lumpur dan memperoleh pendanaan langsung dari KBRI. Selain itu, Yayasan Muhammadiyah Cabang Istimewa turut bermitra dengan KBRI dalam penyelenggaraan Sanggar Bimbingan di Malaysia. KBRI Kuala Lumpur juga menjalin kolaborasi dengan berbagai universitas di Indonesia untuk pelaksanaan KKN internasional.

Adapun Sanggar Bimbingan 'Aisyiyah Kampung Pandan mendapat dukungan penuh dari Pimpinan Pusat 'Aisyiyah serta Pimpinan Cabang Istimewa 'Aisyiyah (PCIA) Malaysia. Berkat dukungan tersebut, SBA dapat berkembang hingga saat ini dan menaungi 35 peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 5. Namun, tidak adanya standar pelaporan keuangan pada Sanggar Bimbingan menunjukkan kurangnya penyesuaian terhadap kerangka hukum PSAK 45, sehingga perlu ada pembekalan mengenai aspek hukum pelaporan keuangan entitas nirlaba. Informasi ini diperjelas oleh informan yang mengatakan bahwa:

“kami kan organisasi tanpa laba, tetapi dalam prakteknya ya laba kami butuhkan untuk mendukung kegiatan operasional ini, standar pelaporan belum jelas. Kami belum mengetahui secara mendasar. Selama ini laporan keuangan kami buat sederhana saja. Jika suatu saat ada keharusan aturan terkait laporan kinerja atau keuangannya ya kami mau saja untuk menyesuaikan”

4.4 Prinsip Visi Strategis

Visi dan misi merupakan bagian dari rencana strategis yang berorientasi ke depan dan menunjukkan cita-cita organisasi. SBA Kampung Pandan memiliki visi “mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai Islam, serta mengembangkan potensi setiap peserta didik agar terbentuk generasi bangsa yang berakarakter, unggul, dan siap menyongsong masa depan gemilang”. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan Sanggar Bimbingan seperti: sholat dhuha berjamaah, *life skill*, literasi hingga presentasi, *fun learning*, perayaan hari besar islam dan hari nasional, pesantren ramadhan, ekstrakurikuler dan lain-lain.

4.5 Prinsip Profesionalisme

SBA Kampung Pandan memiliki tenaga pengajar yang berpengalaman serta loyal dan mendapatkan tambahan tenaga pengajar jika ada Mahasiswa KKN Indonesia baik dari PTMA maupun non PTMA. Berdasarkan evaluasi, seluruh unsur Sanggar Bimbingan sudah menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku. Berbagai pelatihan dan bimbingan teknis juga didapat dari KBRI Malaysia untuk para pengelola dan tenaga pengajar Sanggar Bimbingan. Namun, ketiadaan pelatihan keuangan atau manajemen bagi pengelola laporan keuangan menjadi hambatan utama penerapan prinsip ini. Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“tenaga pengajar kami adalah orang yang sudah dibekali pengalaman dan pelatihan. Itu sudah sesuai dengan standar pengajar yang dibutuhkan maupun disyaratkan dalam pendirian SB. Kami rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga pengajar untuk perbaikan kedepannya. Dan hasil yang selalu kami dapati yaitu tenaga kami telah menerapkan aturan SOP yang ada”

4.6 Prinsip Responsiveness

SBA Kampung Pandan berusaha memberi ruang terhadap kebutuhan anak-anak PMI untuk melanjutkan pendidikan formal di Indonesia dengan mendapatkan sokongan penuh dari PCIM, PCIA, dan PRIM dan mampu menyesuaikan layanan dengan kondisi lokal seperti: penyediaan tempat hingga sarana yang cukup memadai, kerjasama dengan sekolah Muhammadiyah se-Indonesia khususnya sekolah boarding, kerjasama dengan berbagai universitas baik PTMA maupun non PTMA. Dalam hal menjawab berbagai masalah internal terutama pada wali murid yang mengalami penunggakan pembayaran SPP, SBA Kampung Pandan juga cukup tanggap yakni dengan memberikan surat tagihan dan surat peringatan atau panggilan pada wali murid tersebut. Hal ini selaras dengan hasil pernyataan dari informan sebagai berikut:

“SB selalu berupaya memberikan respons yang cepat terhadap segala permasalahan yang mungkin muncul untuk bisa segera memberikan Solusi. Keadaan keterbatasan tenaga pengajar kami respon dengan memanfaatkan Kerjasama dengan PTMA untuk pengiriman tenaga pendidik secara continue. Sedangkan terkait keuangan siswa kami memberikan surat pengingat untuk wali muridnya. Dan apabila memang keluarganya kesulitan ekonomi akan kami bebaskan saja”

4.7 Prinsip Efisiensi dan Efektivitas

Visi dan misi setiap program dan aktivitas SBA Kampung Pandan disesuaikan dengan tujuan dan cita-cita organisasi. Dengan adanya visi dan misi, program dapat direncanakan dengan baik dan program dapat berjalan dengan efektif. Dalam hal pengelolaan anggaran, Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Malaysia memiliki tanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran. SBA Kampung Pandan mengelola anggaran untuk kegiatan yang diadakan, tetapi menggunakan kas sebagai stimulan, SBA Kampung Pandan mencari sponsor dari PCIA Malaysia untuk kegiatan yang berhubungan dengan edukasi. Beberapa kendala yang dialami SBA Kampung Pandan seperti operasional sekolah yang hanya didapat dari iuran SPP dan pembayaran tidak stabil setiap bulannya. Meskipun SBA Kampung Pandan menerima donasi dari pihak lain tetap belum mencukupi, terutama jika ingin menambah guru atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“kegiatan di SB telah disesuaikan sejalan dengan Visi misinya. Untuk urusan anggaran dan keuangan selain dari iuran siswa, SB juga mengandalkan sponsor atau pendanaan lain yaitu dari PCIM. Namun dana sponsor ini tidak bisa diperoleh secara terus menerus. Terkadang ya ada terkadang tidak. Pendapatan yang pastinya ya Cuma dari iuran siswa saja sehingga jika ingin menambah pengajar yang tetap kami belum mampu”

V. KESIMPULAN

Sanggar Bimbingan 'Aisyiyah (SBA) Kampung Pandan telah menerapkan sebagian besar prinsip *good governance* dalam tata kelolanya, seperti visi strategis yang jelas, *profesionalisme* tenaga pengajar, serta kemampuan responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan wali murid. Meskipun demikian, terdapat kelemahan signifikan pada aspek Akuntabilitas, Transparansi, dan Supremasi Hukum. Kelemahan ini ditunjukkan pada laporan keuangan yang disusun masih bersifat sederhana dan belum mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 untuk entitas nirlaba, sehingga belum mencerminkan akuntabilitas dan aspek hukum yang optimal. Rendahnya tingkat transparansi juga terlihat dari tidak adanya sistem dokumentasi yang baik, ketiadaan mekanisme audit internal maupun eksternal serta tidak adanya publikasi laporan tahunan secara resmi. menunjukkan perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas bidang manajemen keuangan. Selain itu, Akuntabilitas sangat bergantung pada kepercayaan terhadap pemegang kas, tanpa adanya sistem kontrol internal formal. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya pelatihan peningkatan kapasitas di bidang manajemen keuangan. Dengan memperkuat penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara menyeluruh, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Sanggar Bimbingan 'Aisyiyah Kampung Pandan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi operasional, dan keberlanjutan dalam mendukung pendidikan anak-anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

REFERENSI

- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Hartutik, E. (2025). Analisis Penerapan PSAK 45 dalam Penyusunan Laporan Keuangan di TK Muslimat NU 1 Dewi Masyithoh Gondanglegi Malang. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 5(2), 244-254. <https://doi.org/10.11594/jesi.05.02.02>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Jakarta: IAI.
- Meinarti, S., Sahade, & S, M. (2024). Analisis Implementasi Good Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 338–348. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.135>
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurrahman, D., & Triwahyuni, D. (2024). Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Sanggar Bimbingan. *Global Political Studies Journal*, 8. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v8i2>
- Purba, S., Pardede, W. N., Theofany, P., Milala, S., Kristina Br Purba, E., Anjelina, M., & Hutagaol, S. (2024). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Karo. *Management & Accounting Expose*, 7(2), 33-47.
- Qomariyah, L., & Sulistyowati, E. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1).
- Ramadhan, A.Z., & Suryaningrum, D.H. (2020). Analisis Penerapan Good Governance pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba. *Public Management and Accounting Review*, 1 (1), 1-9.
- Santosa, P. (2008). Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Safitri, R. N. ., & Narasti, M. (2023). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) pada Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(2), 1781–1789. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i3.1442>